



Jakarta Perkuat Infrastruktur Pencegah Banjir

Pemprov DKI mengantisipasi potensi banjir pada musim hujan dengan optimalisasi pompa, pemetaan area rawan genangan, dan pembangunan infrastruktur pengendali.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan sejumlah langkah antisipasi menjelang musim hujan yang diperkirakan tiba bulan depan. Upaya tersebut mencakup pembenahan saluran drainase di berbagai lokasi, memastikan kesiapan infrastruktur pengendali banjir, dan pemetaan area rawan genangan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Nirwono pada Rabu (30/10/2024) menyatakan, pihaknya mengoptimalkan pengoperasian dan pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir sebagai antisipasi menghadapi musim hujan.

Hingga Oktober 2024, Pemprov DKI telah memiliki 577 unit pompa stasioner di 202 titik dengan kondisi yang terawat baik. Selain itu, terdapat 557 unit pompa *mobile* dan 254 unit alat berat yang siap digunakan untuk menghadapi potensi banjir.

Pompa stasioner berfungsi mengalirkan air di wilayah yang tidak bisa dialirkan secara gravitasi, yang disebabkan oleh penurunan muka tanah di sebagian wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, pompa *mobile* digunakan untuk mempercepat penanganan genangan di jalan raya, permukiman, serta area tanpa pompa stasioner.

"Kami juga memiliki sekitar 6.941 petugas yang siap siaga, termasuk operator pompa dan satgas di lapangan," ujarnya.

Pemetaan lokasi rawan banjir juga dilakukan untuk mempercepat penanganan di area yang rentan terdampak. Jakarta Selatan tercatat terdapat lokasi rawan banjir terbanyak, yakni 10 kelurahan, disusul Jakarta Timur ada 7 kelurahan, Jakarta Barat 5 kelurahan, dan Jakarta Utara 3 kelurahan.

Pihak Dinas SDA DKI juga secara rutin mengeruk sedimen lumpur di sungai, waduk, dan saluran air. Per September 2024, hasil pengerukan dari sungai mencapai sekitar 193.000 meter kubik, sementara pengerukan saluran penghubung mencapai 90.000 meter kubik.

Pembenahan puluhan sa-

luran drainase di Jakarta juga terus dilakukan. Salah satunya berada di Kelurahan Petojogetan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang ditargetkan selesai pada 30 November 2024.

Dinas SDA DKI juga turut membangun infrastruktur pengendali banjir lainnya, termasuk waduk atau embung, penguatan tanggul-tanggul kali, serta sistem polder. Melalui Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 322 miliar untuk pengadaan lahan dan pembangunan waduk serta embung.

Pemerintah juga akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer dari Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bokit Duri, Kebon Baru, Bidara Cina, hingga Manggarai, yang akan menjadi prioritas dalam APBD 2025.

Perlu sinergi

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi musim hujan yang diprediksi terjadi mulai bulan depan.

"Antisipasi banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh satu dinas. Dibutuhkan sinergi lintas perangkat daerah, bukan hanya dari dinas sumber daya air saja," ujar Teguh.

Teguh meminta perangkat daerah memetakan titik-titik genangan dan meminta Dinas SDA DKI memastikan ketersediaan sarana penunjang, seperti pompa stasioner dan *mobile*, serta kesiapan polder.

"Terdapat beberapa titik yang harus diperhatikan, seperti *underspans* menuju Bandara Halim, Cempaka Putih, dan *underspans* lain," katanya.

Ia juga meminta Dinas Perumahan dan Hutan Kota DKI memperhatikan penopangan pohon yang rawan tumbang, serta Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk membersihkan lingkungan dari sampah pascabanjir. "Diperlukan kerja sama guna memantau penyakit yang muncul akibat banjir serta rekayasa lalu lintas jika ada genangan," kata Teguh.

Pengamat tata kota dari

Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyarankan Pemprov DKI agar menjalankan upaya 5R, yaitu regenerasi sungai, rehabilitasi drainase kota, revitalisasi SDEW (sungai, danau, embung, waduk), restorasi kawasan pesisir, dan reforestasi mangrove.

Nirwono menambahkan bahwa upaya 5R perlu melibatkan perangkat daerah lain untuk efektivitas pengendalian banjir. "Namun, perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah 5R. Misalnya, regenerasi sungai dan revitalisasi SDEW berpotensi membawa konsekuensi relokasi warga di sekitar badan sungai," ujar Nirwono.

Musim hujan

Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Ardhasona Sopaheluwakan mengatakan, awal musim hujan di Jakarta diperkirakan akhir Oktober hingga pertengahan November 2024, dengan puncak musim hujan pada Februari 2025.

"Kejadian hujan dalam beberapa hari terakhir bukan merupakan tanda awal musim hujan," kata Ardhasona.

Musim hujan di Indonesia bervariasi, dimulai di barat Sumatera pada Agustus 2024 dan secara bertahap menyebar ke wilayah timur hingga Desember 2024. Sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada Oktober hingga November 2024.

Durasi musim hujan di berbagai wilayah akan bervariasi, mulai dari enam dasarian (2 bulan) hingga 33 dasarian (11 bulan). Durasi musim hujan 2024-2025 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi juga akan lebih panjang daripada biasanya.

Sementara itu, warga yang tinggal di kawasan pesisir utara Jakarta diimbau mewaspadaai banjir akibat pasang air laut (*rob*). Fenomena ini biasanya terjadi bersamaan dengan fase bulan purnama yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum.

Wilayah itu antara lain Kaul Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kaul, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru. (11)